



Efektivitas Kebijakan Penyuluhan Pertanian pada Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Rejoso Kabupaten Nganjuk

Aulia Igga Meichasari ^{1*}, Widyawati ², Dandy Patrija Wirawan ³

¹⁻³ Fakultas Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Indonesia

Email: auliaigga@gmail.com

*Penulis korespondensi : auliaigga@gmail.com

Abstract, *This study aims to analyze the effectiveness of agricultural extension policy in empowering shallot farmers in Rejoso Village, Nganjuk Regency. The background of this research is based on the importance of agricultural extension as a public policy instrument that functions to enhance farmers' knowledge, skills, and independence. Although extension programs have been routinely implemented, their effectiveness needs to be evaluated to ensure that the policy truly addresses the needs and problems faced by farmers in the field. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies, then analyzed thematically using data reduction, data presentation, and inductive conclusion-drawing techniques. Data validity was tested through source and method triangulation. The results show that the agricultural extension policy in Rejoso Village is considered effective based on the five indicators of public policy effectiveness proposed by Riant Nugroho, namely accurate policy, accurate implementers, accurate targets, supportive environment, and proper process. The extension materials are relevant to farmers' needs, the implementers possess adequate technical competence, and the program successfully reaches active shallot farmers. A strong socio-institutional environment, supported by farmer associations, contributes to effective implementation, although ecological challenges such as extreme weather and pest attacks remain. The extension process is systematic and participatory, covering stages of planning, implementation, assistance, and evaluation. Overall, the agricultural extension policy in Rejoso Village has improved the capacity and independence of shallot farmers. However, strengthening the number of extension workers, digitalizing evaluation systems, and providing entrepreneurship training are necessary to ensure the sustainability of policy effectiveness.*

Keywords: *agricultural extension, farmer empowerment, Nganjuk Regency, policy effectiveness, Rejoso Village*

Abstrak, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penyuluhan pertanian dalam pemberdayaan petani bawang merah di Desa Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya penyuluhan pertanian sebagai instrumen kebijakan publik yang berfungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian petani. Meskipun program penyuluhan telah dilaksanakan secara rutin, efektivitasnya perlu dievaluasi agar kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan dan permasalahan petani di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan induktif. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyuluhan pertanian di Desa Rejoso tergolong efektif berdasarkan lima indikator efektivitas kebijakan publik menurut Riant Nugroho, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Materi penyuluhan relevan dengan kebutuhan petani, pelaksana memiliki kompetensi teknis yang memadai, dan sasaran program menjangkau petani bawang merah aktif. Lingkungan sosial-kelembagaan yang kuat melalui paguyuban tani mendukung pelaksanaan kebijakan, meskipun tantangan ekologis seperti cuaca ekstrem dan serangan hama masih terjadi. Proses penyuluhan berlangsung sistematis dan partisipatif, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Secara keseluruhan, kebijakan penyuluhan pertanian di Desa Rejoso mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian petani bawang merah. Namun, diperlukan penguatan jumlah penyuluh, digitalisasi evaluasi, serta pelatihan kewirausahaan agar efektivitas kebijakan dapat berkelanjutan.

Kata kunci: Desa Rejoso, efektivitas kebijakan, Kabupaten Nganjuk, pemberdayaan petani, penyuluhan pertanian

1. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta penggerak perekonomian di pedesaan. Salah satu instrumen kebijakan yang menempati posisi sentral dalam pembangunan sektor ini adalah penyuluhan pertanian. Penyuluhan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, teknologi, serta informasi kepada petani, sehingga mereka mampu meningkatkan keterampilan, mengoptimalkan sumber daya, dan memperbaiki kesejahteraan keluarga. Menurut Pangaribuan et al. (2022), penyuluhan pertanian bukan sekadar pendidikan teknis, melainkan bagian integral dari pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, penyuluhan menjadi strategi penting untuk mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan pasar, iklim, dan teknologi.

Salah satu aspek utama yang berkontribusi terhadap efektivitas penyuluhan adalah penggunaan teknologi digital. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Singh et al., (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi dalam layanan penyuluhan memungkinkan informasi untuk disebarkan dengan lebih efisien kepada petani, dan peningkatan akses terhadap informasi dapat berpengaruh positif terhadap produktivitas. Pemanfaatan alat digital yang tepat telah terbukti meningkatkan keterlibatan petani dan mempercepat proses adopsi terhadap teknik pertanian modern. efektivitas tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan penyuluh dalam menyampaikan pesan yang relevan dan mudah dipahami oleh petani. Rahman (2022) menyatakan bahwa transformasi pertanian memerlukan pendekatan berbasis bukti melalui evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Penyuluh yang kompeten dan terlatih berperan sebagai mediator antara pengetahuan ilmiah dan praktik lapangan, memastikan bahwa petani dapat menerapkan teknik yang disarankan dengan cara yang paling sesuai untuk kondisi lokal mereka. Keberhasilan penyuluhan juga dipengaruhi oleh tingkat partisipasi petani dalam program-program tersebut. Irdiana et al. (2024) menjelaskan bahwa partisipasi aktif petani dalam penyuluhan adalah salah satu indikator kunci dari keberhasilan program. Ketika petani berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan, mereka akan lebih berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan baru yang mereka peroleh.

Sejalan dengan peran penting tersebut, efektivitas penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh kegiatan teknis di lapangan, tetapi juga oleh kualitas kebijakan yang mendasarinya. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak terlepas dari andil pemerintah dalam menghasilkan atau mengeluarkan kebijakan sesuai permasalahan yang dihadapinya (Slamet dwi prayitno, 2022). Namun, Meskipun penyuluhan memiliki peran signifikan, efektivitas

implementasinya sangat bergantung pada kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan penyuluhan pertanian yang tepat sasaran berpotensi mempercepat pemberdayaan petani, namun kebijakan yang kurang sesuai justru dapat menimbulkan pemborosan sumber daya. Nugroho (2021) menegaskan efektivitas kebijakan dapat dilihat melalui lima indikator utama, yakni tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Prinsip ini menjadi kerangka penting untuk menilai sejauh mana penyuluhan mampu memberdayakan petani dalam aspek pengetahuan, keterampilan, akses informasi, dan kemandirian. Atas dasar inilah, penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas kebijakan penyuluhan pertanian dalam konteks pemberdayaan petani bawang merah di Desa Rejoso, Kabupaten Nganjuk, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil bawang merah potensial.

**Kecamatan Rejoso, Nganjuk Pasok Nyaris 10
Persen Bawang Merah Nasional**



Jacobus E. Lato · Kamis, 19 Agustus 2021 | 22:47 WIB

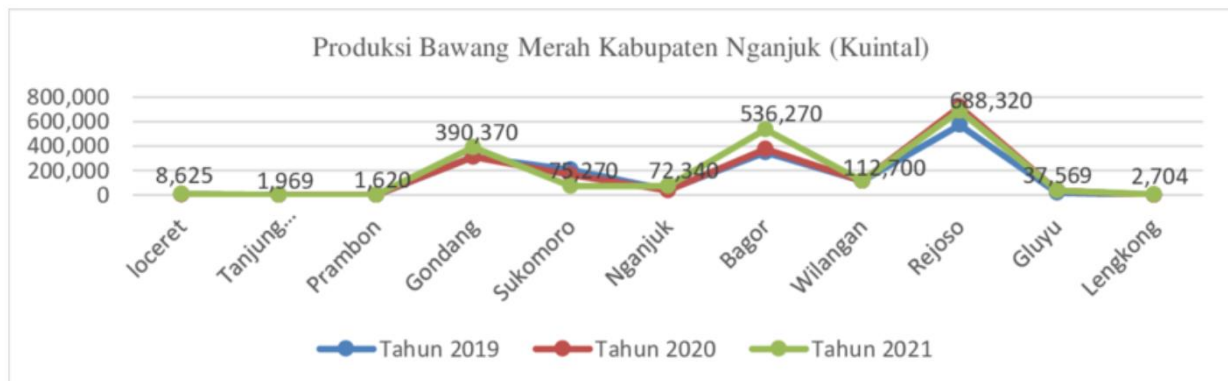


Sumber : Website Hallo Jatim

Gambar 1 : Kecamatan Rejo Pemasok Bawang Terbesar.

Secara geografis, Rejoso merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Nganjuk yang terletak di bagian utara, dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 24 desa. Lokasi Kecamatan Rejoso tergolong strategis karena dilalui jalur penghubung antara Kabupaten Nganjuk dengan Kabupaten Bojonegoro. Bagian selatan wilayah ini berupa dataran rendah yang didominasi areal persawahan dengan komoditas utama padi dan bawang merah. Dengan jumlah penduduk mencapai 74.266 jiwa dan luas wilayah sekitar 151,66 km², Kecamatan Rejoso menempati posisi penting sebagai salah satu sentra produksi bawang merah terbesar di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Hallo jatim, Desa Rejoso memiliki kontribusi signifikan sebagai pemasok bawang merah nasional, yaitu sekitar 10% persen dari total konsumsi nasional, dengan estimasi produksi tahunan mencapai 177 ribu ton. Potensi agraris tersebut menjadi latar yang relevan untuk mengkaji efektivitas kebijakan

penyuluhan pertanian, khususnya karena bawang merah merupakan komoditas strategis dengan nilai ekonomi tinggi.



Sumber : 1 Website Research Gate

Gambar 2 : Grafik Produksi Bawang Merah di Nganjuk.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019–2021 mengenai produksi bawang merah menurut kecamatan di Kabupaten Nganjuk, terlihat bahwa hasil produksi mengalami fluktuasi. Kecamatan Rejoso consistently menghasilkan bawang merah lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain. Tanaman bawang merah di Kabupaten Nganjuk menyebar di berbagai kecamatan, namun Kecamatan Rejoso dikenal sebagai sentra utama. Desa Mojorembun, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Rejoso, merupakan salah satu penghasil bawang merah terbesar sehingga menjadikan daerah ini identik dengan komoditas tersebut. Aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan bawang merah juga sangat beragam, antara lain sistem bagi hasil (paroan) antara pemilik lahan dan petani penggarap, serta praktik jual beli bawang merah yang melibatkan petani dan pedagang lokal.



Sumber : 2 Website Media Seputar Kita

Gambar 3 : Petani Mengalami Gagal Panen Bawang.

Jika melihat kondisi riil di lapangan, ditemukan bahwa petani bawang merah di Desa Rejoso masih menghadapi sejumlah persoalan yang menghambat produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai teknik budidaya modern, pengendalian hama yang masih tradisional, serta ketergantungan pada tengkulak dalam pemasaran hasil panen. Hambatan lain yang muncul adalah akses terbatas terhadap sarana produksi berkualitas dan lemahnya jaringan kelembagaan. Situasi ini menyebabkan tingkat kesejahteraan petani belum meningkat secara signifikan, meskipun bawang merah memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi yang dimiliki dengan kapasitas nyata petani dalam mengelola usaha tani secara berkelanjutan, sehingga efektivitas penyuluhan pertanian perlu ditinjau kembali.

Kesenjangan antara potensi dan realitas ini juga tercermin dalam berbagai temuan empiris. Penelitian Suhartono et al. (2022) mengenai penyuluhan teknik budidaya bawang merah pada kelompok ibu PKK di Desa Kalibejati menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pemahaman tentang pengendalian hama ramah lingkungan dan kesadaran menjaga kelestarian, namun belum disertai evaluasi kuantitatif terhadap dampak jangka panjang pada produktivitas. Di sisi lain, Jemadu et al. (2024) menilai penyuluhan pada Kelompok Tani Barokah Jaya di Kota Batu cukup efektif dengan capaian pelatihan sebesar 79 persen, bimbingan 70,5 persen, dan evaluasi 69 persen. Meski demikian, penelitian tersebut terbatas pada satu kelompok tani sehingga hasilnya belum mencerminkan efektivitas penyuluhan secara lebih luas. Fakta-fakta ini menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas kebijakan penyuluhan pertanian di daerah lain, termasuk Desa Rejoso yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan agraris yang khas. Selain itu, literatur terdahulu memperlihatkan keragaman pendekatan dalam menilai pemberdayaan masyarakat maupun efektivitas kebijakan. Nurwahyuni & Ma'ruf (2021) menekankan bahwa pengembangan desa wisata dapat memberdayakan masyarakat dari sisi ekonomi dan kapasitas sosial, meskipun masih terkendala partisipasi dan transparansi. Mawuntu et al. (2022) meneliti efektivitas PPKM mikro dan menyimpulkan bahwa kebijakan cukup berhasil, tetapi pelaksanaannya menghadapi tantangan resistensi dan kurangnya sosialisasi. Dalam konteks bawang merah, Apriyanto dkk. menemukan bahwa kebijakan pemerintah daerah Brebes berperan dalam pemberdayaan petani, meski masih terkendala keterbatasan distribusi sumber daya. Di sisi teknis, Suhartono et al. (2022) dan Jemadu et al. (2024) membuktikan bahwa penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani bawang merah. Akan tetapi, mayoritas penelitian tersebut

masih terfokus pada dimensi teknis maupun kebijakan umum, belum secara spesifik menilai efektivitas kebijakan penyuluhan terhadap pemberdayaan petani bawang merah di tingkat desa.

Dari uraian tersebut, tampak adanya kesenjangan penelitian yang belum banyak diteliti. Kajian-kajian yang ada lebih menyoroti aspek teknis budidaya atau kebijakan makro dalam kerangka ketahanan pangan, sedangkan penelitian yang mengaitkan efektivitas kebijakan penyuluhan dengan pemberdayaan petani bawang merah di tingkat lokal masih jarang ditemukan. Desa Rejoso, dengan potensi bawang merahnya, menjadi konteks yang relevan untuk mengisi kekosongan literatur ini. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan akademis maupun praktis terkait efektivitas penyuluhan pertanian sebagai kebijakan pemberdayaan. Selain mengisi kesenjangan akademik, penelitian ini juga memiliki pijakan regulatif yang kuat. Landasan normatif penyuluhan pertanian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang menegaskan tujuan penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha agar mengelola usaha tani secara produktif, efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Kebijakan ini diperkuat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang mengarahkan peningkatan produktivitas pertanian berbasis pemberdayaan petani. Dengan demikian, penyuluhan di Desa Rejoso tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan daerah.

Dengan mempertimbangkan nilai ekonomi tinggi bawang merah sebagai komoditas strategis nasional, urgensi penelitian ini semakin jelas. Agar program yang berjalan dapat memberdayakan petani sesuai dengan kebutuhan lokal, evaluasi kebijakan penyuluhan diperlukan. Penelitian ini menawarkan beberapa manfaat. Ini mencakup bidang teoritis melalui pengayaan literatur yang membahas efektivitas kebijakan dari sudut pandang pemberdayaan petani; bidang praktis melalui saran untuk meningkatkan program penyuluhan bagi penyuluh dan pemerintah daerah; dan bidang empiris melalui penyediaan data nyata tentang bagaimana kebijakan penyuluhan berdampak pada petani bawang merah di Desa Rejoso. Penelitian ini hanya membahas bagaimana kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso berhasil selama dua tahun terakhir, yang membuatnya lebih terfokus. Sementara subjek penelitian adalah petani bawang merah dan penyuluh pertanian lapangan, objek penelitian adalah kebijakan penyuluhan yang dilaksanakan. Faktor-faktor seperti pengetahuan, keterampilan, akses ke informasi, dan kemandirian adalah bagian dari pemberdayaan petani. Dengan batasan ini, penelitian ini tidak mempelajari produksi teknis atau kebijakan pertanian secara nasional secara menyeluruh.

Dengan memperhatikan latar belakang ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitasnya dalam memberdayakan petani bawang merah.

2. LANDASAN TEORI

Teori Efektifitas Kebijakan

Menurut Nugroho (2021), efektivitas kebijakan publik dapat dianalisis melalui lima indikator utama yang dikenal dengan konsep *5 Tepat*, yakni tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Tepat kebijakan merujuk pada kesesuaian antara rumusan kebijakan dengan hakikat masalah yang hendak diselesaikan, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Tepat pelaksana berkaitan dengan siapa yang menjalankan kebijakan, mencakup kompetensi, kewenangan, serta kemampuan koordinasi antar lembaga yang berperan dalam implementasi kebijakan. Tepat target menekankan pentingnya penentuan sasaran yang sesuai agar kebijakan dapat menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan. Tepat lingkungan berkaitan dengan dukungan faktor internal maupun eksternal, seperti kelembagaan, budaya masyarakat, kondisi sosial ekonomi, maupun dukungan politik yang dapat menunjang efektivitas kebijakan. Sementara itu, tepat proses menyoroti bagaimana mekanisme perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berkesinambungan. Kelima indikator ini bersifat integratif, artinya keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh terpenuhinya seluruh aspek tersebut secara seimbang.

Dalam konteks penyuluhan pertanian, teori efektivitas kebijakan Riant Nugroho relevan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan penyuluhan dapat mencapai tujuan pemberdayaan petani. Tepat kebijakan tercermin dalam kemampuan program penyuluhan menjawab masalah utama petani, seperti keterbatasan akses teknologi, informasi pasar, maupun modal. Tepat pelaksana dapat dilihat melalui peran penyuluh pertanian yang menjadi ujung tombak kebijakan, di mana kapasitas, kualitas komunikasi, serta ketersediaan sarana pendukung sangat menentukan hasil penyuluhan. Tepat target berhubungan dengan sejauh mana penyuluhan benar-benar menysasar pelaku utama, yakni petani beserta keluarganya, bukan hanya pihak lain yang kurang relevan. Tepat lingkungan terlihat dari adanya dukungan sosial, budaya gotong royong, serta komitmen pemerintah daerah yang mendukung kegiatan penyuluhan. Sedangkan tepat proses diwujudkan melalui mekanisme penyuluhan yang partisipatif, terstruktur, serta berorientasi pada evaluasi berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan kelima indikator tersebut, efektivitas kebijakan penyuluhan pertanian dapat

diukur secara komprehensif, sehingga penelitian ini memiliki kerangka teoritis yang kuat untuk menilai keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan di lapangan.

Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian adalah suatu proses yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada petani. Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas pertanian dengan mendorong penggunaan praktik pertanian dan teknologi yang lebih baik. Dalam situasi seperti ini, penyuluhan berfungsi sebagai penghubung penting antara petani, lembaga penelitian, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pertanian yang berkelanjutan. Wibowo & Haryanto (2020).

Di Indonesia, sistem penyuluhan pertanian telah mengalami banyak perubahan dan adaptasi, terutama sebagai akibat dari munculnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Irawan (2023) menekankan betapa pentingnya penyuluh dalam membangun korporasi pertanian terpadu berbasis keluarga. Ini semakin penting di tengah modernisasi pertanian dan tuntutan keberlanjutan. Penyuluh tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bertindak sebagai instruktur dan mentor yang membantu petani memperbaiki praktik tradisional dan menerapkan inovasi baru Muntasiroh et al. (2023). Dalam proses penyuluhan, kemampuan penyuluh untuk berkomunikasi sangat penting. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Irdiana et al. (2024), optimalisasi komunikasi antara penyuluh dan petani dapat meningkatkan pemahaman penyuluh dan keterlibatan petani dalam kegiatan penyuluhan. Selain itu, komunikasi yang baik memungkinkan penyuluh untuk menyesuaikan metode dan materi penyuluhan dengan kelompok petani yang berbeda. Penyuluhan pertanian menghadapi banyak masalah selama pandemi COVID-19 Menurut Wibowo & Haryanto (2020), untuk terus mendukung petani, penyuluh harus beradaptasi dengan menggunakan berbagai cara baru, seperti teknologi digital. Untuk memastikan bahwa petani tetap mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk mempertahankan produksi pertanian di tengah ketidakpastian, penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam metode penyuluhan.

Dari Penyuluhan pertanian membantu petani memahami teknik terbaik untuk menanam tanaman. Untuk ilustrasi, Muntasiroh et al. (2023) menyelidiki bagaimana peran penyuluh memengaruhi pengetahuan petani tentang standar prosedur operasional (SOP) untuk budidaya kopi organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran penyuluh sebagai guru dan komunikator sangat membantu petani memahami praktik pertanian berkelanjutan. Kecepatan adaptasi dan inovasi dalam penyuluhan dalam konteks ini sangat penting. Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan dukungan pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan ini

(Puryantoro et al., 2023). Akibatnya, penyuluhan pertanian dapat terus meningkatkan pendapatan dan produktivitas petani serta memastikan keberlanjutan sistem pertanian Indonesia. Hasilnya, penyuluhan pertanian sangat penting untuk meningkatkan praktik pertanian, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, dan membantu mereka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di bidang pertanian. Penyuluhan dapat membantu pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Indonesia dengan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan petani dan penggunaan teknologi modern.

Pemberdayaan Petani

Salah satu komponen penting dari pengembangan pertanian di Indonesia adalah pemberdayaan petani, yang mencakup peningkatan produksi dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial petani. Proses pemberdayaan ini biasanya melibatkan berbagai inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan kelompok tani untuk membantu petani memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang mereka butuhkan.

Pemerintah desa berperan aktif dalam pemberdayaan petani. Azis (2022)) menyatakan bahwa pemerintah desa sangat penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat petani. Menurut Wahyuna H. Maida (2022) Pemerintah desa diharapkan dapat membantu petani mengakses berbagai sumber daya, layanan, dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. pemerintah bisa lebih Terfokus untuk mengupayakan kesejahteraan petani dengan cara membuat lagi berbagai strategi atau konsep pertanian secara Kukuh atau mantap karena semakin meningkatnya produktifitas dan kesejahteraan petani maka perkembangan cengkeh akan meningkat. Pendekatan ini diharapkan memungkinkan petani untuk mengelola usahatani mereka dengan lebih bebas dan efektif. Ritonga (2021) mengatakan bahwa sangat penting untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat sipil. Disebutkan bahwa partisipasi petani dalam proses pemberdayaan merupakan indikator keberhasilan program tersebut. Ketika petani terlibat secara aktif dalam proses pemberdayaan, mereka akan merasa memiliki program tersebut, yang berdampak positif pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan. Selain itu, pemuda memainkan peran strategis dalam pemberdayaan petani. Ritonga (2021) menemukan bahwa organisasi Pemuda Tani Indonesia (PTI) telah membantu petani mandiri melalui berbagai program di desa. Dalam situasi ini, pemuda tidak hanya melakukan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga menjadi penggerak perubahan yang aktif yang membantu dan mendidik petani di sekitar mereka.

Pemberdayaan termasuk penyediaan dan pelatihan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas. Studi Arum et al. (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas produksi secara signifikan dapat dicapai dengan mendorong petani jamur tiram melalui pelatihan dan penyediaan alat produksi baru. Petani dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Pada era digital, pemberdayaan petani bergantung pada penggunaan teknologi informasi. Noriko et al. (2024) menekankan pentingnya menggunakan model pertanian berkelanjutan berbasis digital. Model ini akan memungkinkan petani mengakses informasi tentang konservasi tanah dan air serta pemasaran hasil pertanian. Metode ini membantu petani mengadaptasi dan mendapatkan manfaat dari perkembangan zaman. Selain itu, pemberdayaan petani menghadapi tantangan baru sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Wibowo & Haryanto (2020)) menekankan cara penyuluh pertanian beradaptasi dengan situasi yang menghalangi komunikasi yang efektif selama pembatasan aktivitas fisik. Untuk menjaga ketahanan pangan di tengah krisis, mereka menekankan pentingnya inovasi dalam penyuluhan dan penguatan pemberdayaan. Secara keseluruhan, pemberdayaan petani di Indonesia mencakup berbagai elemen, seperti memperkuat institusi lokal, meningkatkan kemampuan individu dan kelompok tani, dan memasukkan teknologi ke dalam praktik pertanian. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting bahwa berbagai pemangku kepentingan bekerja sama satu sama lain dan bahwa petani sendiri berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses, makna, dan dinamika implementasi kebijakan penyuluhan pertanian dalam memberdayakan petani bawang merah. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah. Desain studi kasus digunakan karena penelitian dilakukan secara intensif dan mendalam pada satu lokasi, yaitu Desa Rejoso, Kabupaten Nganjuk, sehingga mampu memberikan gambaran kontekstual mengenai efektivitas kebijakan penyuluhan pertanian di wilayah tersebut.

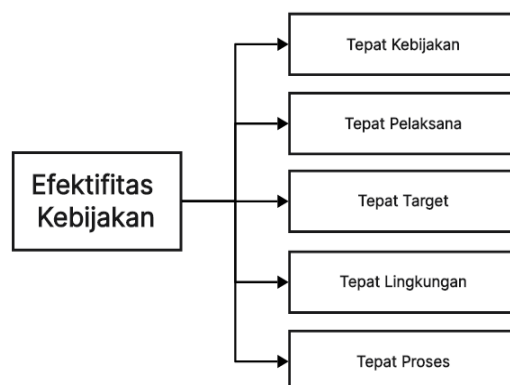
Subjek penelitian terdiri atas penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan petani bawang merah yang menjadi sasaran program penyuluhan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni dengan menetapkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2017)), purposive sampling merupakan

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan khusus sehingga informasi yang dikumpulkan lebih representatif. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, serta data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen kebijakan, laporan resmi penyuluhan, publikasi pemerintah, dan literatur ilmiah terkait.

Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Analisis bersifat induktif dengan cara menarik pola, hubungan, dan makna dari data empiris di lapangan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member check kepada informan untuk memastikan kebenaran informasi. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar data itu sendiri sebagai pembanding untuk verifikasi

Pembahasan

Berikut Merupakan Hasil penelitian yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan dengan penyuluh pertanian dan petani bawang merah di Desa Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, temuan tersebut dievaluasi menggunakan lima metrik efektivitas kebijakan publik, menurut Nugroho (2021)): kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang tepat, target yang tepat, lingkungan yang tepat, dan proses yang tepat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan secara menyeluruh bagaimana kebijakan penyuluhan pertanian di Desa Rejoso telah membantu petani bawang merah dan meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat tani setempat.



Sumber 1 : Olah data peneliti

Gambar 4 : Matrix Efektifitas Kebijakan.

Tepat Kebijakan

Desa Rejoso, Kabupaten Nganjuk, memiliki program penyuluhan pertanian yang tepat karena dirancang untuk memenuhi kebutuhan petani bawang merah lokal. Menurut temuan wawancara dan observasi lapangan, kebijakan ini secara langsung menjawab masalah utama yang dihadapi petani. Ini termasuk kekurangan pengetahuan tentang metode pertanian kontemporer atau modern masa kini, penggunaan pupuk yang tidak efisien, dan ketidakmampuan untuk mengelola pemasaran dan hasil pascapanen. Program penyuluhan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur meningkatkan kapasitas petani secara signifikan. Salah satu narasumber petani, Pak Bambang, mengatakan bahwa penyuluhan akan membantu memahami teknik tanam, pemupukan, dan pengendalian hama atau OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), dan akan memberikan materi tentang peningkatan kapasitas dan kualitas bawang merah, pengelolaan hasil panen menjadi bahan pangan yang ergonomis dan inovatif, serta cara pemasaran hasil panen secara mandiri. dalam hal ini, kebijakan pelatihan tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis. tetapi juga mencakup elemen kewirausahaan dan inovasi produk. Oleh karena itu, kebijakan tersebut berkontribusi pada pemberdayaan petani untuk menuju pertanian yang modern dan berdaya saing. narasumber Petani lain, Pak Eko, membuat pernyataan serupa. Dia menganggap materi penyuluhan tentang teknik tanam bawang merah, teknik pemupukan, teknik pengendalian hama, dan teknik pascapanen sangat relevan dengan keadaan di lapangan. Menurutnya, materi yang diberikan mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan karena mayoritas warga merupakan penghasil bawang merah. Ini menunjukkan bahwa penyusunan kebijakan didasarkan pada karakteristik lokal dan kebutuhan nyata petani Desa Rejoso yang bergantung pada komoditas bawang merah sebagai sumber pendapatan mereka.

Kegiatan penyuluhan di Balai Desa Rejoso dilakukan menggunakan metode pembelajaran yang menekankan partisipasi aktif peserta. Penyuluh pertanian lapangan (PPL) memanfaatkan lahan demonstrasi milik kelompok tani untuk menyampaikan materi. Manajemen Tanaman Sehat (MTS) merupakan salah satu strategi yang diberikan untuk petani untuk menerapkan pengendalian hama terpadu (PHT). MTS didefinisikan sebagai pengelolaan agroekosistem dalam suatu kawasan/hamparan dengan pendekatan yang terencana, komprehensif, integral dan berkelanjutan yang meliputi semua aspek baik ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Tim Penyuluh yakni dari Tim Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk dan juga Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan ini memberikan contoh penggunaan dosis pupuk organik dan anorganik yang seimbang serta metode untuk mendeteksi serangan hama secara dini. Petani aktif berbicara tentang dosis pupuk dan jenis pestisida mana yang paling

efektif. Dalam Kegiatan Penyuluh menekankan bahwa pengelolaan hasil panen sangat penting selain aspek teknis budidaya. Sesi diskusi membahas pengolahan sederhana untuk meningkatkan daya simpan, seperti membuat bawang goreng dalam kemasan dan mengeringkan bawang. Dalam upaya menciptakan nilai tambah ekonomi, kebijakan Dinas Pertanian mendorong diversifikasi produk pertanian. Materi penyuluhan bersifat aplikatif dan diberikan dalam bahasa yang mudah dipahami dengan contoh nyata yang relevan dengan situasi petani di daerah tersebut. Tingkat partisipasi yang tinggi dan tingkat keterlibatan aktif peserta menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sangat terkait dengan kebutuhan lapangan. Menurut Riant Nugroho (2017) tentang efektivitas kebijakan publik, tepat kebijakan berarti bahwa isi kebijakan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sasaran dan menyelesaikan masalah yang dibuat. Dalam hal ini, kebijakan penyuluhan Desa Rejoso telah memenuhi kriteria tersebut melalui berbagai aspek atau indikator:

1. Pertama, ada relevansi kontekstual yang menekankan pertumbuhan komoditas unggulan lokal, bawang merah, yang berfungsi sebagai sumber ekonomi desa.
2. Kedua, terjadi keterpaduan antara aspek kewirausahaan dan teknis. Dalam hal ini, materi penyuluhan mencakup tidak hanya teknik budidaya tetapi juga strategi pemasaran dan pengolahan hasil.
3. Ketiga, masyarakat sasaran sebagian besar petani yang belum terbiasa dengan teknologi pertanian merupakan dasar untuk pembuatan kebijakan.
4. Keempat, menurut Pak Daryanto sebagai Ketua penyuluh, kebijakan ini berhubungan dengan Program Penyuluhan Pertanian (PPP) Kabupaten Nganjuk, dan merupakan agenda rutin PPP untuk mengatasi masalah pertanian.

Kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso benar secara konteks dan substansi. Kebijakan ini meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pertanian dengan fokus pada daya saing ekonomi, efisiensi, dan inovasi. Dalam pertimbangan empiris menunjukkan bahwa masih ada beberapa elemen yang perlu diperkuat agar kebijakan bekerja dengan lebih baik.

1. Pertama, petani masih menghadapi kendala dalam menerapkan teknik budidaya modern karena kekurangan modal dan sarana produksi.
2. Kedua, materi penyuluhan tentang pengelolaan pascapanen dan pemasaran masih sangat dasar dan belum dilengkapi dengan pelatihan kewirausahaan yang komprehensif.
3. Terakhir, tidak ada sistem umpan balik terstruktur antara petani dan penyuluh untuk melacak hasil penerapan di lapangan setelah kegiatan.

Kondisi tersebut tidak mengurangi ketepatan arah kebijakan. sebaliknya, mereka berfungsi sebagai alat evaluasi untuk penyempurnaan implementasi pada tahap berikutnya. Kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso berpotensi menjadi model kebijakan lokal yang efisien, terlibat, dan berkelanjutan untuk memberdayakan petani bawang merah dan meningkatkan ketahanan ekonomi pedesaan dengan meningkatkan aspek pendampingan pascapelatihan dan pembinaan berkelanjutan.

Tepat Pelaksana

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, dan pemerintah desa bekerja sama untuk menerapkan kebijakan penyuluhan pertanian di Desa Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan temuan dari wawancara dan observasi lapangan, ketiga komponen ini bekerja sama untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan dengan baik, fleksibel, dan berkelanjutan. Menurut Bapak Daryanto selaku ketua penyuluhan, menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan merupakan "rutinitas agenda dari PPP (Program Penyuluhan Pertanian), setiap RT pasti ada, dan biasanya untuk mengatasi masalah pertanian, tidak hanya fokus pada bawang merah, ada juga padi dan kedelai." Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan merupakan bagian dari agenda rutin pemerintah daerah yang direncanakan secara sistematis oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura (PPP). Untuk memenuhi kebutuhan petani di lapangan, program ini dilaksanakan dengan prinsip kesinambungan dan fleksibilitas. Selain itu, Pak Daryanto menjelaskan bahwa "monitoring dilakukan untuk memantau perkembangan petani yang mengikuti program, apakah mereka sudah menerapkan teknik baru dan apakah ada hasil perubahannya." Kegiatan pemantauan yang dilakukan langsung ke lahan petani menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi telah berjalan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa penyuluh tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berperan sebagai pendamping aktif untuk memastikan bahwa peserta mengimplementasikan hasil penyuluhan. Pak Dhani, selaku perangkat desa, menyatakan bahwa pemerintah desa "berperan sebagai fasilitator dan pendukung utama program" dan bekerja sama melalui "pertemuan rutin antara penyuluh dan ketua kelompok tani." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga berjalan dengan baik. Mobilisasi peserta, penyediaan fasilitas, dan penyebaran informasi kepada masyarakat tani semua dilakukan oleh pemerintah desa melalui perangkat RT dan kelompok tani. Dengan menggunakan mekanisme ini, lembaga teknis pertanian dan pelaksana kebijakan di tingkat desa bekerja sama untuk membentuk sistem kerja yang bekerja sama.

Dalam pengamatan observasi di Balai Desa Rejoso menunjukkan bahwa penyuluhan dilakukan dengan profesionalisme dan partisipasi. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh aparat desa yang menekankan pentingnya penyuluhan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, penyuluh memberikan materi menggunakan alat bantu visual seperti lembar informasi dan contoh benih bawang merah unggul. Penyuluh menunjukkan kemampuan teknis yang baik ketika mereka menjelaskan metode budidaya, dosis pemupukan, dan metode pengendalian hama yang ramah lingkungan. Selama praktik lapangan, penyuluh membantu petani menyiapkan lahan dan memupukan dasar di area demonstrasi plot. Beberapa minggu setelah kegiatan, penyuluh memeriksa pertumbuhan tanaman. Dalam observasi lapangan menunjukkan bahwa hubungan antara penyuluh dan petani berlangsung secara aktif dan diskusi. Tampak bahwa petani sangat memperhatikan masalah lapangan seperti penggunaan pestisida dan ketidakaturan musim. Solusi praktis yang disesuaikan dengan situasi lokal diberikan oleh penyuluh sebagai respons. Pendekatan andragogi, sebuah pendekatan pembelajaran orang dewasa yang menekankan partisipasi dan pengalaman praktis peserta, ditunjukkan oleh pola komunikasi dua arah ini. penyuluhan masih menghadapi beberapa tantangan. Satu penyuluh harus menangani lebih dari 20 peserta dari berbagai kelompok tani dalam satu kegiatan, sehingga pengawasan pascaperlatihan menjadi tidak efektif. Selain itu, ada beberapa petani yang berusia lanjut yang kesulitan memahami materi teknis seperti sistem tanam berjarak dan penggunaan pupuk berimbang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi kendala karena keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan dalam pengetahuan teknologi. Indikator tepat pelaksana terdiri dari tiga komponen utama, menurut teori efektivitas kebijakan publik Nugroho (2021): kompetensi pelaksana, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi lapangan. Ketiga komponen tersebut terpenuhi saat penyuluhan di Desa Rejoso.

1. Pertama, kemampuan Anggota penyuluh untuk mendampingi petani secara langsung dan menyampaikan materi teknis secara aplikatif menunjukkan kompetensi pelaksana.
2. Kedua, koordinasi antarlembaga terjadi melalui kerja sama antara Dinas Pertanian, pemerintah desa, dan kelompok tani dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.
3. Ketiga, kemampuan penyuluh untuk menyesuaikan materi dengan kondisi lapangan, seperti perubahan pola musim tanam dan serangan hama, menunjukkan kapasitas adaptif.

Selain ketiga komponen tersebut, pelaksana juga secara teratur melakukan tugas edukatif, fasilitatif, dan koordinatif. Peningkatan pengetahuan teknis petani mewujudkan fungsi edukatif; penyediaan sarana dan dukungan teknis oleh pemerintah desa dan Dinas

Pertanian menunjukkan fungsi fasilitatif; dan komunikasi intensif antara penyuluh, perangkat desa, dan kelompok tani memastikan kegiatan terarah dan terintegrasi. Meskipun efektivitas pelaksanaan telah menunjukkan hasil yang baik, ada dua masalah kelembagaan yang perlu diperhatikan, yakni;

1. Keterbatasan jumlah Anggota penyuluh menyebabkan intensitas monitoring yang tidak merata.
2. Rendahnya literasi teknologi menghalangi sebagian petani dari memanfaatkan inovasi digital dalam pertanian.

Dalam Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa komitmen, profesionalisme, dan hubungan kerja yang sinergis antara pelaksana dan penerima manfaat meningkatkan keberhasilan penyuluhan di Desa Rejoso. Keberlanjutan program juga diperkuat oleh dukungan sosial dari pemerintah desa dan kelompok tani. Untuk mempertahankan efektivitas ini, diperlukan beberapa langkah. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah tenaga penyuluh sehingga beban kerja lebih proporsional; memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi pertanian digital kepada penyuluh; dan mendorong kader tani muda sebagai mitra lokal penyuluh untuk mempercepat transfer inovasi pertanian. Oleh karena itu, kebijakan penyuluhan pertanian di Desa Rejoso dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan yang tepat karena dijalankan oleh aparatur yang kompeten, dikoordinasikan secara kelembagaan, dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan ekonomi petani. Meskipun kendala struktural dan teknologis masih ada, pelaksanaan kebijakan ini masih sangat efektif. Mereka dapat berfungsi sebagai model untuk praktik penyuluhan yang berkolaborasi dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Tepat Target

Kebijakan penyuluhan pertanian di Desa Rejoso, Kabupaten Nganjuk, berhasil mencapai sasarannya, yaitu petani bawang merah aktif yang terlibat langsung dalam produksi dan pengelolaan hasil pertanian. Dengan demikian, kebijakan ini dapat dianggap tepat target. Hasil observasi lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa penyuluhan yang diberikan tidak hanya bersifat administratif atau seremonial, tetapi juga berfokus pada kelompok masyarakat yang berperan penting dalam sektor pertanian desa. “Setiap bulan kami para petani selalu membahas masalah pertanian yang terjadi di desa kami, maka dari itu setiap desa dibentuklah paguyuban tani sebagai wadah para petani untuk beraspirasi,” kata Pak Bambang, yang merupakan petani. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peserta penyuluhan adalah petani yang aktif secara sosial dan ekonomis dalam kegiatan kelompok tani. Paguyuban tani sangat penting untuk membantu petani, penyuluh, dan pemerintah desa berkolaborasi, dan

memastikan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan secara berjenjang, terarah, dan berfokus pada kebutuhan nyata komunitas pertanian. Pak Eko (petani) juga mengatakan hal yang sama, mengatakan bahwa dia "cukup sering dan alhamdulillah ikut serta aktif" dalam kegiatan penyuluhan dan menganggap program itu "mudah dan sesuai dengan kebutuhan karena mayoritas penghasil bawang merah." Kutipan ini memperkuat gagasan bahwa petani terlibat dalam kegiatan penyuluhan sebagai pelaku utama dalam sektor pertanian, bukan sekadar peserta administratif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konteks sosial-ekonomi masyarakat tani Desa Rejoso telah dipertimbangkan saat membuat dan menerapkan kebijakan penyuluhan. Akibatnya, tujuan program sesuai dengan tujuan kebijakan pertanian daerah untuk pemberdayaan petani.

Dalam observasi menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan inklusif. Namun, mereka tetap selektif untuk peserta yang relevan dengan sektor pertanian. Kebanyakan orang yang mengambil bagian dalam kegiatan ini adalah petani yang aktif dan tergabung dalam kelompok tani seperti Paguyuban Tani Rejoso dan Kelompok Tani Sumber Makmur. Fakta bahwa peserta hadir, mengenakan pakaian kerja, dan mengikuti kegiatan setelah jam bertani pagi, menunjukkan bahwa mereka benar-benar pelaku lapangan yang aktif dalam kegiatan budidaya bawang merah. Selama kegiatan, penyuluh menekankan betapa pentingnya materi yang disampaikan diterapkan secara langsung, terutama kepada petani yang memiliki lahan dan aktif mengelola usaha tani mereka. Petani aktif membahas masalah konkret selama sesi tanya jawab. Mereka membahas hal-hal seperti cara mengatasi hama ulat daun, sistem irigasi saat musim kering, dan penggunaan limbah pertanian untuk membuat pupuk organik. Jumlah peserta yang tinggi menunjukkan bahwa penyuluhan mencapai kelompok sasaran yang tepat, yaitu petani yang termotivasi dan mampu menerapkan hasil pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian mereka. Selain itu, observasi menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan menjangkau petani besar dan petani dengan lahan kecil dan menengah juga. Dalam pembangunan pertanian pedesaan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip kebijakan pro-poor, di mana program pemerintah ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan peningkatan kapasitas. Selain itu, penyuluhan di Rejoso memungkinkan petani muda dan pemula untuk berpartisipasi, yang menghasilkan regenerasi petani dan kesinambungan pengetahuan pertanian di wilayah tersebut. Menurut teori Riant Nugroho (2017) tentang efektivitas kebijakan publik, indikator target yang tepat menunjukkan bahwa ketika kelompok sasaran yang dituju sesuai dengan masalah yang ingin diselesaikan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, kebijakan

tersebut dianggap efektif. Tiga elemen utama menunjukkan bahwa tujuan kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso tepat, yaitu:

1. Kesesuaian antara penerima manfaat dan tujuan kebijakan Peserta penyuluhan adalah petani bawang merah aktif yang membutuhkan lebih banyak pengetahuan dan efisiensi budidaya.
2. keterlibatan kelompok sasaran secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan Petani tidak hanya berpartisipasi secara pasif dalam praktik lapangan, diskusi, dan forum paguyuban tani, di mana mereka saling berbagi informasi tentang program penyuluhan.
3. Keterlibatan yang berkelanjutan dalam kelompok sasaran Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan dilakukan secara rutin setiap bulan, yang menunjukkan bahwa petani bukan hanya penerima manfaat sementara, tetapi merupakan bagian dari sistem pembelajaran berkelanjutan.

Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani adalah dua hasil nyata dari sasaran kebijakan penyuluhan Desa Rejoso. Setelah acara penyuluhan, "kami para petani jauh lebih bisa memperhitungkan langkah-langkah ke depannya untuk membudidayakan bawang merah dengan mudah dan efisien." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada hasil belajar (learning outcomes) yang konkret. Hasil ini termasuk kemampuan perencanaan yang lebih baik, efisiensi produksi yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan.

Penyuluhan meningkatkan kohesi sosial dan solidaritas antarpetani selain efek teknis. Ini ditunjukkan oleh komentar Pak Eko, yang menyatakan bahwa kegiatan ini membuat petani "lebih kompak dan sering saling tukar pengalaman tentang cara tanam dan pupuk." Solidaritas kelompok tani menjadi salah satu bentuk pemberdayaan sosial yang membantu komunitas petani mempertahankan kemandirian dan daya tahan ekonomi mereka. Meskipun kebijakan penyuluhan Desa Rejoso telah memenuhi kriteria ketepatan sasaran, temuan penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa elemen yang perlu ditingkatkan.

1. Pertama, diperlukan strategi rekrutmen dan pendekatan edukatif untuk menarik minat petani muda terhadap kegiatan pertanian produktif.
2. Kedua, keterlibatan petani perempuan masih terbatas pada kegiatan pascapanen, sehingga diperlukan penyuluhan khusus yang menekankan pengolahan hasil dan pemasaran berbasis rumah tangga.

Dari sudut pandang kebijakan publik, kondisi menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian di Desa Rejoso telah mencapai sasaran dengan tepat. Namun, untuk menjangkau petani non-konvensional secara lebih luas, diperlukan peningkatan inklusi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso telah mencapai indikator tepat target karena telah berhasil menjangkau petani bawang merah yang secara aktif terlibat dalam pertanian, meningkatkan kapasitas sosial dan teknis, dan menciptakan sistem pembelajaran yang berkelanjutan. Karena sasaran ini tepat, penyuluhan di Rejoso adalah praktik kebijakan yang efektif yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat tani secara substantif daripada administratif.

Tepat Lingkungan

Dalam pelaksanaan kebijakan penyuluhan pertanian di Desa Rejoso, indikator lingkungan yang tepat menunjukkan bahwa kebijakan sangat sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat setempat, serta kondisi ekologi. Lingkungan sosial dan kelembagaan yang kuat terbukti menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan, meskipun masih ada tantangan ekologis yang perlu diatasi agar program dapat bertahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dukungan sosial dan kelembagaan sangat penting untuk membuat kebijakan penyuluhan bekerja dengan baik. Pemerintah desa, yang diwakili oleh Pak Dhani, menyatakan bahwa mereka bertindak "sebagai fasilitator dan pendukung utama program" dengan menyediakan "dukungan berupa pupuk, bibit, atau alat." Ini menunjukkan bahwa ada dukungan struktural dari tingkat pemerintahan desa, yang mencakup dukungan administratif dan substantif melalui penyediaan sarana produksi dan fasilitas kegiatan. Karena pemerintah desa berfungsi sebagai penghubung antara kelompok tani di Desa Rejoso dan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, koordinasi lintas kelembagaan dapat dilakukan dengan baik dan partisipasi petani tetap terjaga. Faktor sosial, selain dukungan resmi dari pemerintah desa, sangat penting untuk keberhasilan penyuluhan. Menurut Pak Bambang (petani), "setiap desa dibentuklah paguyuban tani sebagai wadah para petani untuk beraspirasi," paguyuban tani membantu petani berkomunikasi satu sama lain secara horizontal dan vertikal. Petani dapat bertukar pengalaman, menemukan masalah teknis, dan memberikan saran untuk kegiatan penyuluhan berikutnya melalui forum ini. Struktur sosial yang kuat ini menunjukkan modal sosial yang kuat, juga dikenal sebagai modal sosial. Modal sosial ini berfungsi sebagai pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kebijakan penyuluhan.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa program penyuluhan di Desa Rejoso dilaksanakan secara fleksibel dan sesuai dengan masyarakat lokal. Penyuluhan diadakan di balai desa, di lahan pertanian, di rumah ketua kelompok tani, dan di forum paguyuban tani rutin. Pola interaksi yang terbuka antara penyuluh, aparat desa, dan petani menunjukkan bahwa kebijakan diterapkan dalam lingkungan sosial yang melibatkan orang-orang dan sesuai dengan budaya gotong royong masyarakat desa. Sebaliknya, faktor lingkungan masih menjadi masalah yang cukup besar saat menggunakan hasil penyuluhan di lapangan. Menurut wawancara, Pak Eko (petani) menyatakan bahwa "kendala utamanya cuaca itu pasti, lalu modal yang terbatas dan serangan hama/wereng." Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode pertanian kontemporer sering dihalangi oleh kekeringan musiman, fluktuasi iklim, dan curah hujan yang tidak menentu. Menurut Ketua penyuluhan pertanian Bapak Daryanto, "kondisi alam, hama, serta faktor usia petani biasanya menjadi hambatan untuk teknologi-teknologi baru." Usia dan kebiasaan tradisional sebagian besar petani menyebabkan adopsi inovasi pertanian menjadi lambat. Ini terutama berlaku untuk teknologi baru seperti irigasi tetes dan penggunaan pestisida hayati. Selain itu, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Rejoso masih menggunakan metode konvensional untuk pemupukan dan pengendalian hama. Lahan bawang merah di beberapa wilayah bahkan mengalami genangan karena sistem drainase yang tidak ideal. Penyuluh memberikan rekomendasi teknis seperti memperbaiki saluran drainase dan memilih varietas bawang merah yang lebih tahan terhadap kelembaban tinggi dalam diskusi lapangan. Namun, kendala utama untuk menerapkan solusi tersebut secara menyeluruh adalah keterbatasan sarana dan biaya. Indikator lingkungan yang tepat terdiri dari dua aspek utama, berdasarkan teori Riant Nugroho (2017) tentang efektivitas kebijakan publik:

1. lingkungan sosial-kelembagaan yang mendukung pelaksanaan kebijakan melalui nilai, norma, dan struktur sosial yang berpartisipasi; dan
2. lingkungan fisik-ekologis yang menentukan keberhasilan penerapan program di lapangan.

Di Desa Rejoso, aspek sosial-kelembagaan telah dipenuhi secara optimal. Lingkungan sosial yang kondusif untuk pelaksanaan kebijakan terdiri dari prinsip gotong royong, solidaritas kelompok tani, dan koordinasi yang baik antara petani, pemerintah desa, dan penyuluh. Sebaliknya, aspek fisik-ekologis terus menghadapi masalah, seperti cuaca ekstrim, serangan hama, dan ketidakteraturan sistem irigasi. Namun, faktor sosial yang adaptif dan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan dapat membantu menyeimbangi hambatan lingkungan yang ada. Pada saat sesi observasi menunjukkan bahwa kekuatan lingkungan sosial dan

kelembagaan lokal sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan penyuluhan di Rejoso. Petani dapat saling membantu satu sama lain untuk mengatasi masalah teknis di lapangan melalui kegiatan penyuluhan berbasis kelompok. Proses ini menunjukkan adaptasi sosial yang tinggi di kalangan petani, menunjukkan bahwa kebijakan telah berfungsi dalam sistem sosial yang stabil dan berhasil.

Dari perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut menuntut dukungan terus menerus dari pemerintah daerah untuk penguatan infrastruktur pertanian dan elemen teknis. Untuk meningkatkan ketahanan ekologis dan efektivitas kebijakan penyuluhan dalam jangka panjang, adalah penting untuk membangun sistem irigasi yang efisien, memperbaiki saluran drainase, dan mengembangkan teknologi untuk mitigasi perubahan iklim. Secara keseluruhan, indikator lingkungan yang tepat untuk kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso sebagian besar terpenuhi. Kesuksesan penyuluhan bergantung pada budaya gotong royong, dukungan sosial dan kelembagaan yang kuat, dan partisipasi tinggi kelompok tani. Efektivitas kebijakan tidak dikurangi oleh masalah ekologis seperti serangan hama dan cuaca ekstrem. Desa Rejoso memiliki potensi besar untuk mempertahankan efektivitas dan memperluas dampak kebijakan penyuluhan pertanian secara berkelanjutan dengan dukungan sosial-kelembagaan yang kokoh dan responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan lokal.

Tepat Proses

Kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, partisipatif, dan berfokus pada hasil pembelajaran yang nyata bagi petani. Proses penyuluhan tidak bersifat seremonial, tetapi mencakup siklus lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, dan evaluasi. Oleh karena itu, dapat dikategorikan sebagai proses yang tepat. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan secara berjenjang dan direncanakan, menurut Daryanto, Ketua Penyuluhan. Menurutnya, instruksi diberikan "mulai dari penggarapan lahan, tanah, pemupukan, pengairan." Petani yang mengikuti program melakukan monitoring untuk mengetahui apakah mereka sudah menerapkan teknik baru dan apakah ada perubahan. ini menunjukkan bahwa proses penyuluhan telah menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) melalui langkah-langkah yang jelas dan dapat diukur. Metode ini memastikan bahwa instruksi tidak hanya disampaikan tetapi juga dipantau bagaimana hasil pembelajaran diterapkan di lapangan. Selain itu, Daryanto mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan "dua sampai tiga kali, selama tiga bulan dilakukan dua sampai tiga kali", menunjukkan konsistensi dan kesinambungan program. Ini adalah syarat penting untuk pembinaan petani karena penyuluhan harus berfungsi sebagai proses pembelajaran jangka panjang, bukan sekadar kegiatan sesaat. Di Desa Rejoso, penyuluhan menunjukkan

keterlibatan masyarakat yang tinggi. Sementara Pak Dhani, perangkat desa, mengatakan bahwa "respons masyarakat cukup positif, terutama dari petani yang melihat langsung peningkatan hasil panennya sendiri," Daryanto mengatakan bahwa para petani "sangat aktif dan antusias." Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa petani tidak hanya berpartisipasi secara pasif, tetapi juga aktif terlibat dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan menerapkan apa yang mereka ketahui di tanah mereka sendiri.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa setiap sesi penyuluhan dimulai dengan percakapan interaktif antara penyuluh dan orang-orang yang mengikutinya. Petani diberi kesempatan untuk berbicara tentang tantangan mereka, seperti waktu tanam, pengendalian hama, dan penggunaan pupuk organik. Selanjutnya, penyuluh memberikan solusi yang disesuaikan dengan keadaan lokal. Pengalaman peserta adalah sumber utama pembelajaran, karena pendekatan yang digunakan bersifat dialogis dan andragogis. Penyuluh menunjukkan secara langsung metode pemupukan berimbang dan pengaturan jarak tanam yang ideal selama sesi praktik lapangan. Petani memiliki kesempatan untuk mempraktekkan dan mendapatkan umpan balik secara langsung dari orang lain. Proses ini menunjukkan bahwa penyuluhan tidak hanya mentransfer data tetapi juga mengubah pengetahuan melalui interaksi langsung dan pengalaman empiris. Mekanisme Proses dan Kegiatan yang Berlangsung Secara umum, proses penyuluhan di Desa Rejoso dilakukan dalam empat tahapan utama, yaitu:

1. **Persediaan :** Pada tahap ini, perlu ada koordinasi antara Dinas Pertanian, penyuluh pertanian lapangan, dan perangkat desa. Materi yang dipilih didasarkan pada kebutuhan nyata petani yang dikumpulkan melalui kelompok tani. Peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, dan pengendalian hama musiman adalah fokus utama.
2. **Implementasi :** Kegiatan penyuluhan dilakukan di balai desa atau di lahan demonstrasi, juga dikenal sebagai demplot. Agar materi mudah dipahami oleh petani dari berbagai latar belakang usia dan pendidikan, materi disampaikan melalui kombinasi pendekatan ceramah, diskusi kelompok, dan praktik lapangan.
3. **Pendampingan Kegiatan Lapangan :** Untuk menilai seberapa baik hasil penyuluhan diterapkan, penyuluh melakukan kunjungan monitoring ke lahan petani setelah kegiatan penyuluhan selesai. Daryanto menyatakan dalam wawancara bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan "apakah petani sudah menerapkan teknik baru dan bagaimana hasil perubahannya."
4. **Evaluasi dan Umpan Balik :** Evaluasi dilakukan secara informal melalui pertemuan rutin kelompok tani, meninjau perkembangan hasil panen dan efektivitas metode baru.

Namun, sistem evaluasi formal dengan indikator kuantitatif seperti produktivitas per hektar atau efisiensi biaya produksi masih perlu dikembangkan lebih sistematis.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyuluh, pemerintah desa, dan ketua kelompok tani memiliki tugas yang jelas di setiap tahap penyuluhan. Dokumentasi kegiatan, termasuk daftar hadir, catatan diskusi, dan foto kegiatan, disimpan sebagai bukti administratif dan sumber evaluasi untuk pelaksanaan program yang akan datang. indikator proses yang tepat, menurut teori efektivitas kebijakan publik Riant Nugroho (2017):

1. tahapan kebijakan yang sistematis dan berkesinambungan
2. keterlibatan aktif dari pelaksana dan penerima manfaat
3. mekanisme evaluasi yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan

Ketiga prinsip tersebut telah dipenuhi dalam kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso. Penyuluhan dilakukan dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terukur, dan pendampingan yang berkelanjutan. Petani sangat terlibat dalam partisipasi karena mereka bertindak sebagai pelaku utama dan menilai kegiatan. Dari sisi evaluasi, pengawasan langsung di lapangan telah menjadi bentuk pengawasan empiris terhadap keberhasilan program, meskipun sistemnya masih sederhana. Bapak Daryanto juga mengatakan bahwa penting untuk meningkatkan aspek keberlanjutan dan evaluasi kegiatan. Ia menegaskan bahwa "program penyuluhan ini bisa terus berlanjut dan konsisten, bukan hanya sekali atau dua kali saja... penyuluhan harus lebih menyentuh kebutuhan nyata petani, misalnya terkait modal, pemasaran, dan pendampingan lapangan, bukan hanya teori." Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan materi penyuluhan yang lebih komprehensif dengan memasukkan aspek ekonomi, manajerial, dan kewirausahaan agar petani tidak hanya memiliki kemampuan teknis

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penyuluhan di Desa Rejoso telah dilakukan dengan efektif, meskipun beberapa kendala teknis masih ada. Pertama, waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan masa tanam menghalangi beberapa petani untuk mengikuti seluruh sesi. Kedua, dokumentasi hasil kegiatan masih dilakukan secara manual karena tidak ada sistem digitalisasi data petani dan progres pembelajaran. Namun, penyuluh sangat berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan petani. Penyuluh masih melakukan kunjungan non-resmi untuk memberikan bimbingan tambahan. Belajar sambil bekerja, atau belajar dengan melakukan, telah terbukti membantu petani lebih memahami dan lebih percaya diri dalam menerapkan metode baru, seperti penggunaan pestisida hayati, pemupukan berimbang, dan pola tanam berjarak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penyuluhan di Desa Rejoso dipengaruhi oleh kualitas materi dan proses

pelaksanaannya. Mekanisme umpan balik petani sangat penting untuk meningkatkan metode penyuluhan dan menyesuaikannya dengan perubahan yang terjadi di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan di masa mendatang, perlu diambil tindakan strategis seperti:

1. membuat sistem evaluasi yang didasarkan pada indikator dan sistematis untuk menilai kinerja petani pascapenyuluhan.
2. menggunakan Media atau teknologi digital untuk dokumentasi proses pembelajaran dan memantau hasil panen.
3. Petani dapat memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menggabungkan kegiatan penyuluhan dengan program kewirausahaan dan akses modal.

Secara keseluruhan, kebijakan penyuluhan pertanian Desa Rejoso telah memenuhi indikator proses yang tepat karena dilaksanakan melalui tahapan yang direncanakan, partisipatif, dan berfokus pada hasil lapangan nyata. Kebijakan ini telah terbukti efektif secara operasional karena keterlibatan aktif petani, komitmen penyuluh, dan monitoring berkelanjutan. Namun demikian, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam jangka pendek, petani bawang merah Desa Rejoso akan lebih mandiri dan bersaing dalam jangka panjang, diperlukan penyempurnaan aspek evaluasi, integrasi teknologi, dan penguatan dimensi ekonomi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban adalah langkah-langkah yang digunakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sumurgenuk. Meskipun aspirasi masyarakat belum terakomodasi secara merata, proses perencanaan dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah di berbagai tingkatan. Infrastruktur dasar seperti jalan rabat beton, saluran irigasi, drainase, dan sambungan air bersih telah dibangun melalui pelaksanaan pembangunan yang berbasis padat karya tunai dan melibatkan tenaga kerja lokal. Walaupun informasi masih terbatas, tahap evaluasi dan pengawasan melibatkan BPD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat dengan mekanisme transparansi melalui papan informasi proyek. Meskipun pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan peraturan, kapasitas administrasi dan akuntansi aparat desa terbatas. Dengan peningkatan aksesibilitas, produktivitas pertanian, kualitas kesehatan, dan interaksi sosial, hasil pembangunan infrastruktur menunjukkan dampak besar pada masyarakat. Jalan rabat beton memudahkan distribusi produk pertanian ke pasar, saluran irigasi meningkatkan produktivitas, genangan air

dikurangi, dan akses air bersih meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang menghambat optimalisasi, seperti pencairan dana yang tertunda, kualitas material yang buruk, pemeliharaan infrastruktur yang buruk, dan pembangunan yang tidak merata di antara dusun. Akibatnya, Dana Desa telah terbukti memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur desa. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penerapan mekanisme pemeliharaan berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan. Agar manfaatnya dapat dimaksimalkan, diperlukan beberapa saran atau langkah strategis, antara lain:

1. Aparatur desa harus diperkuat dalam bidang administrasi, akuntansi, dan pengelolaan keuangan melalui pelatihan teknis dan dukungan berkelanjutan. Untuk membuat proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Dana Desa lebih efisien, jelas, dan akuntabel, upaya ini sangat penting.
2. Sistem pemeliharaan infrastruktur yang telah dibangun harus diperkuat oleh pemerintah desa. Ini dapat dicapai dengan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat dalam forum musyawarah, memastikan bahwa semua dusun memiliki akomodasi yang mereka butuhkan, dan membentuk kelompok pemelihara infrastruktur berbasis komunitas untuk memastikan bahwa manfaat Dana Desa tersebar luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arum, A. P., Setiyono, S., Subroto, G., & Muchlison, W. (2023). Peningkatan Kapasitas Produksi Petani Jamur Tiram Desa Karangpring Melalui Teknologi Alat Pengepres Baglog Dua Tuas. *Prima Journal of Community Empowering and Services*, 6(2), 93. <https://doi.org/10.20961/prima.v6i2.57649>
- Azis, M. V. N. Al. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23-31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Irawan, N. C. (2023). Peran Penyuluh Dalam Mengembangkan Korporasi Pertanian Terpadu Keluarga Dan Mempromosikan Keberlanjutan Melalui Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Dan Bimbingan. *Agriekstensia*, 22(1), 14-27. <https://doi.org/10.34145/agriekstensia.v22i1.2413>
- Irdiana, E., Nurliza, N., & Kurniati, D. (2024). Optimalisasi Komunikasi Penyuluh Pertanian Dalam Aktivitas Penyuluhan. *Jurnal Penyuluhan*, 20(01), 96-114. <https://doi.org/10.25015/20202445928>
- Jemadu, M. A. Y., Arvianti, E. Y., & Kholil, A. Y. (2024). EFEKTIVITAS PENYULUHAN PERTANIAN KOMODITI BAWANG MERAH PADA KELOMPOK TANI

BAROKAH JAYA DESA BEJI, KECAMATAN JUNREJO, KOTA BATU. *BUANA SAINS*, 24(3), 57-68. <https://doi.org/10.33366/bs.v24i3.6080>

- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro dalam penyebaran Covid-19 di desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(113).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Muntasiroh, I., Gayatri, S., & Prayoga, K. (2023). Pengaruh Peran Penyuluh Terhadap Pengetahuan Petani Kopi Tentang SOP Budidaya Kopi Organik. *Jurnal Litbang Media Informasi Penelitian Pengembangan Dan Iptek*, 19(2), 127-142. <https://doi.org/10.33658/jl.v19i2.356>
- Noriko, N., Mandjusri, A., Mailani, L., & Wijihastuti, R. S. (2024). Pemberdayaan Kemitraan Petani Untuk Ketahanan Pangan Melalui Model Pertanian Berkelanjutan Di Era Digital. *Wikrama Parahita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 219-228. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v8i2.7641>
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan publik: implementasi dan pengendalian kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nurwahyuni, N. E., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di desa jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri. *Publika*, 109-120. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p109-120>
- Pangaribuan, D. H., Nurmauli, N., Sembodo, D. R. J., Utomo, S. D., & Gultom, D. T. (2022). Penyuluhan Pembuatan Pupuk Organik Cair Dari Ekstrak Tanaman Di Desa Sidowaluyo, Kabupaten Lampung Selatan. *Semar (Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Seni Bagi Masyarakat)*, 11(1), 102. <https://doi.org/10.20961/semar.v11i1.59128>
- Puryantoro, P., Widjayanti, L., & Rokhani, R. (2023). Pemuda Dalam Pembangunan Pertanian: A Review. *Agrimor*, 8(4), 197-203. <https://doi.org/10.32938/ag.v8i4.2157>
- Rahman, A. (2022). Agricultural Transformation in Indonesia: Evaluation of Policy Implementation and Challenges Faced. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 691. <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i2.50367>
- Ritonga, M. (2021). Strategi Tindakan Preventif Kepolisian Melalui Komunikasi Massa Menangkal Gerakan Terorisme. *Kalijaga Journal of Communication*, 2(2), 121-134. <https://doi.org/10.14421/kjc.22.03.2020>
- Singh, N. K., Sunitha, N. H., Tripathi, G., Saikanth, D. R. K., Sharma, A., Jose, A. E., & Mary, M. V. K. J. (2023). Impact of Digital Technologies in Agricultural Extension. *Asian Journal of Agricultural Extension Economics & Sociology*, 41(9), 963-970. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2023/v41i92127>
- Slamet Dwi Prayitno. (2022). *Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Legi Kabupaten Ponorogo*. Universitas Dr. Soetomo.

- Sugiyono, Prof. Dr. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D." *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 225.
- Suhartono, S., Faizati, A. R., Wijaya, K. T., Fitriana, A. F., Gholidho, A. F., Afina, Z., Hasna, L. F., Gussyanti, L., Santoso, S., & Istiqomah, N. (2022). Penyuluhan pertanian teknik budidaya bawang merah pada ibu-ibu pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) Desa Kalibeji. *DEDIKASI: Community Service Reports*, 4(1).
<https://doi.org/10.20961/dedikasi.v4i1.55558>
- Wahyuna H. Maida. (2022). Peran Pemerintah Lokal Dalam Pemberdayaan Petani Cengkeh Di Desa Adean Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah. Universitas Dr. Soetomo.
- Wibowo, H. T., & Haryanto, Y. (2020). Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Magelang. *Jurnal Penelitian Peternakan Terpadu*, 2(2).
<https://doi.org/10.36626/jppt.v2i2.286>